



Gubernur Bahas Masalah Dermaga Sambas

Terima Kunker Anggota Ombudsman RI

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalbar Sutarmidji menerima audiensi dari kunjungan kerja dari Anggota Ombudsman Republik Indonesia Johannes Widijantoro yang didampingi Ombudsman Provinsi Kalbar, di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (27/2/23).

Pada pertemuan bersama Anggota Ombudsman RI tersebut, Sutarmidji pun sempat membahas terkait satu masalah yang belum selesai yang sudah lama sejak 2014 yakni masalah Dermaga Sambas.

Dijelaskannya bahwa terkait pembayaran pemprov tidak ada masalah. Namun yang menjadi silang pendapat ini kan masalah keabsahan dalam pembayaran itu, yang mana disarankan dengan putusan pengadilan karena sudah ada audit dari auditor dan kesimpulan mereka bahwa pemprov termasuk yang dirugikan.

"Tapi kita prihatin masyarakat dirugikan padahal mereka tidak berkaitan langsung dengan itu, hanya karena dekat situ saja. Yang masalahnya adalah mengeluarkan uang negara kan ada mekanismenya," ujarnya.

Kalau soal lain secara materiil rekomendasi dari Ombuds-

man dikatakannya bicara mengenai hati, itulah keadilan karena mereka tidak tahu kecuali bagian dari kegiatan itu. Akan tetapi mereka bukan bagian, karena keteledoran pelaksana mereka (masyarakat) merasakan dampak.

"Akhirnya kemarin kita konsultasi ke Kemendagri dan saya minta pak sekda yang pergi ke sana untuk mengkon-sultasikan. Tadi sudah saya sampaikan ke Ombudsman juga agar ada persepsi kita membayar, tapi tidak menjadi temuan," jelasnya

Lebih lanjut dikatakannya, dari mekanisme anggaran memang membutuhkan rekomendasi pengadilan. "Materil rekomendasi Ombudsman ini saya pahami betul, karena masyarakat berdampak dari masalah pembangunan dermaga tersebut. Jadi kita konsultasi ke Kemendagri," ujarnya.

Sutarmidji menambahkan bahwa setiap rekomendasi dari Ombudsman selalu ia arahkan dan diperintahkan untuk segera ditindaklanjuti disamping (Pemprov) juga terus membe-nahi di sektor pelayanan.

Di tempat yang sama, Anggota Ombudsman RI Johannes

Widijantoro menyampaikan kedatangannya kali ini ke Kalbar yakni melakukan silaturahmi kepada Gubernur Kalbar karena selama ini intensitas kerja sama dan komunikasi Ombudsman dengan Pemprov Kalbar sudah terjalin melalui MoU.

"Kami juga mencoba mengkonfirmasi beberapa hal permasalahan yang ada di Kalbar dan rencananya kami akan ke perbatasan. Tadi ada informasi dari Gubernur Kalbar akan ada atensi terkait persoalan di sana itu menjadi bagian dari tugas kami untuk mendalami berdasarkan dinamika layanan publik di Kalbar," ujarnya.

Dikatakannya dari sisi Layanan publik di Kalbar dari potret penilaian yang dilakukan Ombudsman sejauh ini diakuinya sudah termasuk dalam kategori penanganan laporan relatif respon pemprov baik artinya cukup tinggi.

"Kalau dilihat dari sisi opini yang kita lakukan tahun kemarin juga masuk dalam zona hijau artinya tingkat kepatuhan tinggi. Beberapa kabupaten kota juga mendapatkan status itu jadi secara umum baik," pungkasnya. (ang)

